

Pemkab HSS Kucurkan Dana Hibah Rp 34,3 Miliar untuk Pilkada, Berikut Rincian Penerimaannya



Penyerahan dana hibah daerah untuk Pilkada 2024 secara simbolis oleh Pj Bupati HSS H Hermansyah kepada Ketua KPU Gusriadi, Kamis (2/5/2024) di Pendopo Bupati HSS. Selain KPU, dana Hibah juga diserahkan kepada Bawaslu HSS, Polres HSS serta Kodim 1003 HSS.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyerahan-dana-hibah-daerah-untuk-Pilkada-2024-secara-simbolis-oleh-Pj-Bupati-HSS-H-Hermansyah.jpg>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucurkan dana hibah dengan total Rp 34.306.567.000, untuk pembiayaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, Calon Bupati/Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.

Dana tersebut untuk diserahkan kepada KPU dan Bawaslu HSS, serta Polres HSS dan Kodim 1003 HSS, Kamis (2/5/2024) di Pendopo Bupati HSS.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemkab HSS dengan para pihak, Diwali Kepala Kantor Kesbangpol HSS Eko Harjidi Putra dengan masing-masing penerima.

Adapun pihak penerimaannya, Ketua KPU Gusriadi, Ketua Bawaslu Hasnan Fauzan, Kapolres HSS AKBP Leo Martin Pasaribu dan Dandim 1003 HSS Letkol Inf Bayu Oktavianto Sudibyo serta Kepala Satpol PP Auliya Sofii Azmi.

Penandatanganan disaksikan Pj Bupati HSS H Hermansyah dan Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi. Sedangkan penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Pj Bupati HSS.

Adapun dana hibah yang diterima, untuk KPU HSS Rp 22.111.800.000, Bawslu HSS Rp 7.888.200.000, Polres HSS Rp 2.663.967.000 dan Kodim 1003 HSS 1.642.600.000.

Pj Bupati HSS Hermansyah mengatakan, direncanakan pekan depan dana hibah tersebut sudah bisa dilakukan proses pencairan oleh masing-masing penerima. Hermansyah mengatakan, dengan disalurkan dana hibah tersebut, mendukung tahapan-tahapan Pilkada HSS.

Pilkada serentak, bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang. Dan saat ini masih tahap proses perekrutan anggota PPK oleh KPU HSS.

“Diharapkan tidak ada kendala yang berarti untuk pelaksanaan Pilkada di HSS, hingga terpilih kepala daerah terbaik yang memimpin HSS ke depan,” kata Hermansyah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tabalong, Pemkab Tabalong memberikan dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024.

Dana hibah ini ditujukan kepada TNI dan Polri sebagai alat negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengamanan.

Pj Bupati Tabalong, Hj Hamida Munawarah secara langsung mendatangani naskah perjanjian hibah daerah terkait pengamanan Pilkada 2024 yang diserahkan kepada Polres Tabalong dan Kodim 1008/Tabalong

Kapolres Tabalong, AKBP Anib Bastian dan Dandim 1008/Tabalong, Letkol Inf Budi Galih menyaksikan dan turut menandatangani naskah perjanjian hibah daerah tersebut, di ruang kerja Pj Bupati Tabalong, Kamis (2/5/2024).

Disampaikan oleh Hj Hamida, dana hibah yang diserahkan untuk pengamanan mencapai Rp 6.77.664.000 dengan rincian penerima, Polres Tabalong, Rp 4.178.514.000 dan Kodim 1008/Tabalong Rp 2.592.150.000.

"Sebagaimana ketentuannya, dana hibah ini hanya dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pengamanan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong tahun 2024," terang Hamida.

Ia pun berharap dalam menjalankan tugas pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, bisa mengawal pelaksanaan tahapan Pilkada. Sehingga situasi di Kabupaten Tabalong tetap aman dan kondusif.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Tabalong AKBP Anib Bastian menyampaikan, bahwa Polres Tabalong akan berupaya memaksimalkan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan negara melalui Pemda dalam pengamanan Pilkada.

Tentunya kata AKBP Anib, pada Pilkada 2024 ini, pengamanan pun akan ditingkatkan mengingat potensi kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu.

"Harapan kami , seperti Pemilu, pelaksanaan Pilkada berjalan, aman dan kondusif," kata Kapolres.

Ia juga berharap warga bisa menyampaikan aspirasi dan jangan mudah terprovokasi berita yang tidak dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Dandim 1008/Tabalong, Letkol Inf Budi Galih menyatakan siap membantu kepolisian, yakni Polres Tabalong dalam mengamankan Pilkada. Sehingga kegiatan pengamanan tercapai dan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, aman dan sukses

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/02/pemkab-hss-kucurkan-dana-hibah-rp-343-miliar-untuk-pilkada-berikut-rincian-penerimanya>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/02/dana-hibah-pengamanan-pilkada-di-tabalong-disiapkan-pj-bupati-harapkan-pilkada-berlangsung-aman>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - a) Pasal 3
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
 - b) Pasal 4
Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - (1) Huruf a. Pemerintah;
 - (2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - (3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
 - c) Pasal 19

- (1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
- (4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

- (1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. *Angka 3*) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4*) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a*) pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - 2) *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Huruf c*) BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) *Huruf d*) BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- 5) *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf (b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf (c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (b) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - (d) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf d*) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf e*) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - e) *Angka 7) Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - f) *Angka 8) Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g) *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka 2*. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c*. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4*. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. *Huruf a*. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c*. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d*. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e*. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

